

MODAL SOSIAL SEBAGAI STRATEGI PENGENTASAN KEMISKINAN SECARA MANDIRI PADA DESA NELAYAN DI SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT

Hamka Naping

ABSTRAK

Strategi pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan selama ini cenderung mereduksi masalah kemiskinan hanya sebagai persoalan ekonomi semata. Akibatnya solusi yang ditawarkan lebih berfokus pada penanganan masalah ekonomi seperti modal, investasi, teknologi dan berbagai aspek finansial lainnya saja. Sementara pada sisi lain kenyataan aktual menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan adalah problem yang multikompleks melibatkan semua aspek dalam kehidupan manusia termasuk masalah kelembagaan dan modal sosial. Tidak dapat dipungkiri bahwa upaya pengentasan kemiskinan membutuhkan penanganan aspek ekonomi, namun harus disadari oleh penentu kebijakan baik di level kabupaten kota maupun pada level propinsi, bahwa pendekatan multi sektor dengan berbasis pada kebutuhan dan potensi masyarakat lokal merupakan alternatif yang memiliki signifikansi tertentu. Artikel ini akan potensi modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat untuk dimanfaatkan bagi upaya pengentasan kemiskinan oleh warga masyarakat lokal itu sendiri.

Kata kunci: modal sosial, pengentasan, kemiskinan.

PENDAHULUAN

Kenyataan menunjukkan bahwa hingga saat ini kondisi ekonomi sebagian besar masyarakat nelayan terutama pada wilayah kawasan timur Indonesia masih miskin. Sementara itu sejumlah program pemberdayaan telah diinteroduser oleh berbagai kalangan, namun hasil yang dicapai (setidaknya hingga saat ini) belum menunjukkan tanda yang menggembirakan.

Secara teoritis dipahami bahwa masyarakat desa, termasuk di dalamnya nelayan memiliki potensi sumberdaya sosial budaya, mereka memiliki seperangkat system pengetahuan (*knowledge system*), sistem nilai (*value system*), system norma (*norm system*), system kepercayaan (*belief system*), dan etos kerja serta saling percaya (*mutual trust*), kemampuan untuk melaksanakan aksi -aksi kolektif (*collective actions*). Seluruh potensi yang dimaksud di atas dipahami sebagai kelembagaan lokal (*local institution*) dan modal

sosial (*social capital*). Bank Dunia (2002) menilai jika kedua potensi itu dimanfaatkan dan difasilitasi secara baik, dapat menjadi kekuatan dahsyat yang mampu mengentaskan mereka dari kemiskinan.

Secara operasional kelembagaan lokal yang terdapat pada masing-masing kelompok masyarakat seperti telah diungkapkan, mengandung seperangkat nilai (*value*) dan norma (*norms*), dimiliki secara bersama oleh anggota masyarakat, berfungsi menata dan mengarahkan perilaku anggota masyarakat memenuhi suatu tujuan tertentu. Melalui sistem nilai dan sistem norma yang dimiliki masyarakat tercipta dan termanifestasikan sejumlah nilai dasar yang memungkinkan warga masyarakat melakukan aksi kolektif (*colective action*), saling membantu sehingga kebutuhan hidupnya, baik secara individual maupun secara kolektif dapat terpenuhi sehingga terhindar dari kefatalan hidup. Sejumlah nilai dan norma dalam kelembagaan lokal tersebut dipahami sebagai



modal sosial (*social capital*) (Fountain, 1997: 3, Fukuyama, 1999: 1). Untuk memahami substansi kelembagaan lokal sebagai wadah berkembangnya modal sosial menuju terciptanya usaha mandiri mengentaskan kemiskinan bagi masyarakat nelayan di dua propinsi yakni Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dilakukan kajian secara mendalam dan menyeluruh (holistik).

Artikel ini memiliki tujuan khusus yaitu:

- (1) untuk melihat secara utuh substansi modal sosial masyarakat nelayan pada komunitas nelayan dalam upaya mengentaskan kemiskinan,
- (2) menganalisis eksistensi kelembagaan lokal sebagai wadah berkembangnya modal sosial menuju pengentasan kemiskinan secara mandiri pada masyarakat nelayan di Propinsi Sulawesi Selatan dan Propinsi Sulawesi Barat.

STUDI PUSTAKA

A. Masyarakat Pesisir Sebagai Nelayan kalangan masyarakat yang berstrata bawah, tidak Sebagai sebuah konsep, masyarakat pesisir memiliki makna orang yang bermukim di sepanjang kawasan peralihan (*interface area*) antara ekosistem laut dan darat dengan batas terluar 20 km dari garis pantai atau berada sejauh 4 sampai 12 mil dari garis pantai ke arah laut (Dahuri 2002). Pemaknaan konsep masyarakat pesisir seperti itu lebih menekankan pada aspek wilayah geografis sebagai determinan. Selain determinasi wilayah geografis seperti itu, masyarakat pesisir dimaknai pula dengan menekankan pada aspek sosial seperti yang dikemukakan oleh Widodo (2006) bahwa sistem manusia dalam perikanan secara sederhana dapat dikelompokkan menjadi nelayan, rumah tangga dan komunitasnya, pengelola pascapanen, pedagang, serta lingkungan sosial ekonomi. Komponen-komponen sosial tersebut saling berinteraksi dalam mempengaruhi pola

pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya laut, kesatuan komponen itu membentuk kesatuan komunitas yang disebut dengan masyarakat pesisir.

Satria (2002) mengemukakan ada 5 (lima) karakteristik utama yang dimiliki oleh masyarakat pesisir yakni sebagai berikut: (a). Sistem pengetahuan, pengetahuan tentang teknik penangkapan ikan yang pada umumnya diperoleh melalui pewarisan dari pendahulu lewat pengalaman empiris. Kuatnya pengetahuan lokal tersebut menjadi salah satu faktor penyebab terjaminannya kelangsungan hidup mereka selaku masyarakat pesisir. (b). Sistem kepercayaan, secara teologis, masyarakat pesisir masih memiliki kepercayaan yang kuat bahwa laut memiliki kekuatan magis sehingga perlu perlakuan – perlakuan khusus dalam melakukan aktivitas penangkapan dan pelayaran agar keselamatan dan hasil tangkapan semakin terjamin. (c). Peran wanita, aktivitas ekonomi wanita merupakan suatu gejala yang umum bagi

terkecuali yang berstatus sebagai isteri. Selain banyak bergelut dalam urusan domestik rumah tangga, kaum isteri kerap menjalankan fungsi ekonomi seperti melakukan aktivitas penangkapan di perairan dangkal, pengolahan ikan maupun kegiatan jasa dan perdagangan, (d). Posisi Sosial, posisi sosial mereka dianggap rendah disebabkan karena keterasingan sebagai akibat dari kurangnya melakukan interaksi dengan masyarakat lain. Mereka kurang melakukan interaksi dengan masyarakat lain karena alokasi waktu yang digunakan untuk melakukan aktivitas penangkapan dan pelayaran jauh lebih banyak dibandingkan dengan melakukan sosialisasi dengan masyarakat lainnya, (e). Karakteristik sumberdaya, sumberdaya maritim lebih merupakan sumberdaya milik bersama (*property right*) sehingga dapat digunakan secara terbuka (*open acces*) oleh semua orang.

B. Modal Sosial

Konsep modal sosial bermula dari Coleman (1988) yang mendefinisikan sebagai berikut aspek-aspek dari struktur hubungan-hubungan antar individu yang memungkinkan mereka menciptakan nilai-nilai baru. Konsep itu kemudian dielaborasi sejumlah sarjana lain dalam kajian mereka, misalnya Ostrom (1992), Putnam (1993, 1995, 1999), Fukuyama (1995), Adams and Someshwar (1996), Bebbington (1998), Lochner (1999), Pretty and Ward (1999), Krishna dan Uphoff (1999) dan lain-lain. Dari kajian-kajian yang dilakukannya terhadap berbagai proyek pembangunan di dunia ketiga Ostrom (1992) misalnya sampai pada suatu kesimpulan bahwa modal sosial merupakan prasyarat bagi keberhasilan suatu proyek pembangunan, sedangkan Putnam (1993) dalam

sosial adalah sesuatu yang lumrah ketika konsep ini semakin luas dikaji dan digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena. Adams and Someshwar (1996:1) misalnya merumuskannya sebagai berikut: "*and between groups of individuals*". Di lain pihak Jules Pretty and Hugh Ward (1999 : 4) menyebut modal sosial sebagai "*reciprocity and exchange between individuals that lubricate co-operation; the bundles of common rules, norms and sanctions mutually-agreed or handed-down; and connectedness, networks and groups*". Benang merah pengertian konsep modal sosial yang diberikan sejumlah ahli akan lebih mudah ditemukan dengan mengenali elemen pokok yang dilekatkan kepadanya sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

kajiannya tentang kehidupan politik di Italia menemukan bahwa modal sosial merupakan unsur utama pembangunannya sebuah masyarakat madani (Fukuyama (1995) yang menggunakan konsep modal sosial tersebut dalam kajiannya di

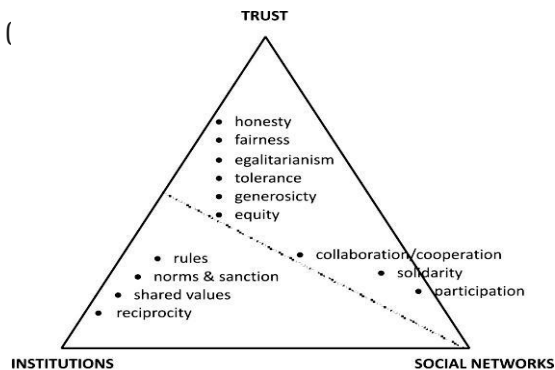
ELEMEN POKOK MODAL SOSIAL	SUMBER

Dari Tabel di atas dapat disarikan sejumlah

bidang ekonomi sosial yang berintikan budaya dari menentukan dalam keberhasilan pembangunan ekonomi.

elemen-elemen pokok *saling percaya* *trust* *honesty* *egalitarianism* *generosity* *toleransi* *fairness* *tolerance* *pranata* dan kemurahan hati (*shared values*) yang meliputi nilai-nilai yang

dan sanksi-sanksi (*norms and sanctions*), dan aturan-aturan (*rules*); (3) **jaringan sosial** (*social networks*), yang meliputi adanya partisipasi (*participation*), pertukaran timbal balik (*reciprocity*), solidaritas (*solidarity*), kerjasama (*collaboration/cooperation*), dan keadilan



Gambar Elemen Pokok Modal Sosial

Sikap saling percaya (*trust*) merupakan unsur pelumas yang sangat penting untuk kerjasama (Pretty and Ward, 1999) atau dalam istilah Putnam (1999) sikap saling percaya melincinkan kehidupan sosial (*trust lubricates social life*). Dalam kajiannya di Italia, Putnam menemukan bahwa para warga negara di negara bagian Emilia-Romagna dan Tuscany, misalnya banyak organisasi-organisasi komunitas yang aktif, dan mereka ditautkan oleh isu-isu publik, bukan melalui pola patronase. Mereka percaya satu sama lain untuk berlaku fair dan mematuhi hukum. Para pimpinan di dalam komunitas-komunitas ini relatif jujur dan komit terhadap kesetaraan; jaringan-jaringan sosial politik diorganisasikan secara horizontal, bukan hirarkikal. Komunitas sipil seperti ini kata Putnam menilai penting solidaritas, partisipasi warga (*civic participation*) dan integritas; dan di dalam komunitas seperti ini demokrasi berjalan (*democracy work*). Sikap saling percaya itu terbangun karena adanya dua sumber yang saling terkait, yaitu norma-norma resiprositas (*norms of reciprocity*) dan jaringan keterlibatan warga

(*networks of civic engagement*).

C. Nelayan dan Fenomena Kemiskinan

Sebagian besar kelompok nelayan di Indonesia berada pada kategori masyarakat miskin, pembenaran teoritisnya dapat dilihat pada sejumlah indikator. Bappenas (2005) menyebut kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar dimaksud antara lain; terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan social politik.

Sayogyo (1995) membuat kategori dan tolak ukur untuk menentukan garis kemiskinan pada dua wilayah yang berbeda yakni masyarakat desa dan masyarakat kota dengan menggunakan indikator jumlah kalori yang dikonsumsi, kebutuhan minimal perkapita di desa adalah 320 kg beras dan di kota 420 kg beras pertahun. Sementara itu Bank Dunia pada tahun 2007 menggunakan indikator pendapatan yakni 2 dollar Amerika perorang per hari, sehingga semua orang yang hidup dengan penghasilan di bawah 2 dollar tersebut adalah miskin (Nugroho, 2009:19).

Dalam perspektif yang lain Mubyarto (1994) melihat bahwa kemiskinan adalah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki si miskin melainkan karena tidak dapat dihindari oleh kekuatan yang ada padanya. Dimensi kemiskinan dapat diartikan sebagai adanya faktor-faktor penghambat yang mencegah atau merintangangi seseorang dalam memanfaatkan kesempatan -kesempatan yang ada di masyarakat, faktor- faktor penghambat tersebut secara umum meliputi faktor internal dan faktor eksternal (Suharto 2005). Faktor

internal yang datang dari si miskin itu sendiri, seperti rendahnya pendidikan atau adanya hambatan budaya seperti malas, mudah menyerah pada nasib, kurang memiliki etos kerja. Sedangkan faktor eksternal, seperti birokrasi atau kebijakan yang dapat menghambat seorang dalam memanfaatkan sumberdaya. Kemiskinan model ini disebut kemiskinan struktural yang terjadi bukan karena ketidakmauan si miskin untuk bekerja melainkan akibat ketidakmampuan sistem dan struktur sosial menyediakan kesempatan yang memungkinkan si miskin keluar dari kemiskinan (Nugroho, 2009:21).

Pemahaman komprehensif berkenaan dengan kemiskinan dikemukakan oleh Nugroho dan Dahuri (2004) dengan membagi kemiskinan yang disebutnya dengan kemiskinan relative dan kemiskinan absolut. Kedua kemiskinan tersebut disebabkan oleh; pertama, kemiskinan alam, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia, kedua, kemiskinan struktural yaitu kemiskinan yang langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh berbagai kebijakan, peraturan, dan keputusan dalam rangka pembangunan, dan ketiga, kemiskinan kultural yaitu kemiskinan yang lebih banyak disebabkan oleh sikap individu dalam masyarakat yang mencerminkan gaya hidup, prilaku atau budaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di empat kabupaten yaitu Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Barru provinsi Sulawesi selatan, serta Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju di Propinsi Sulawesi Barat. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa ke empat kabupaten di dua propinsi tersebut memiliki wilayah laut yang luas dengan sejumlah desa nelayan yang tergolong miskin.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka untuk mengumpulkan data

digunakan teknik wawancara mendalam (*in depth interview*), pengamatan berpartisipasi/terlibat (*full observation participation*), dan diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*), serta studi dokumen yang tersedia di berbagai lembaga terkait.

Penelitian ini menggunakan pendekatan emik (*emic approach*) yang merupakan derivasi dari paradigma penelitian fenomenologi, naturalisme yang berusaha mengungkap fenomena berdasarkan apa yang diketahui, dipercayai, dirasakan dan dilakoni oleh anggota masyarakat yang menjadi obyek penelitian. Data digambarkan melalui teknik deskripsi, baik dengan deskripsi interpretasi maupun deskripsi reproduksi.

PEMBAHASAN

A. Modal sosial dalam masyarakat nelayan

1. Organisasi Lokal

Di lokasi penelitian, peneliti menemukan beberapa organisasi lokal yang keberadaannya masih eksis dan diakui oleh masyarakat karena dapat memperlancar kegiatan sosial ekonomi dan budaya dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Setiap lembaga mempunyai norma dan nilai tertentu yang diberlakukan dan dipertahankan serta dikembangkan di kalangan anggota masyarakat. Ia dipatuhi dan dihormati serta menjadi acuan dalam pola tingkah laku masyarakat, dan bahkan menjadi bagian dari kebudayaan yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Norma dan nilai-nilai itu telah menyatu dalam kehidupan warga desa sehingga sering kali menjadi gerak reflek dalam kehidupan, jika ada sesuatu tindakan dari anggota masyarakat yang menyimpang dari adat atau kebiasaan yang berlaku, maka mereka yang mengetahui langsung menegur atau mengingatkan.

Masyarakat nelayan menganggap bahwa keberadaan kelompok nelayan merupakan hal yang sudah mutlak dan telah dikenal sejak dahulu, karena sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidupnya pada mata

pencarian sebagai nelayan. Dalam masyarakat, terdapat beberapa kelompok nelayan yang merupakan salah satu lembaga lokal yang betul-betul bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat nelayan. Dari beberapa kelompok nelayan yang ada, ini s m u a n y a a k t i f d a l a m m e l a k u k a n keberlangsungan kegiatan rutinnnya, seperti yang dikemukakan oleh Informan sebagai berikut;

“daerah kami memang dikenal dengan daerah kelompok nelayan, karena keberadaan kelompok nelayan yang lebih banyak dibandingkan dengan daerah yang lain dan semua kelompok aktif”.

Dengan eksisnya kelompok nelayan ini tidak terlepas dari peran anggota dalam kelompok nelayan ini dan motivasi antara anggota itu sendiri. Menurut salah satu anggota, bahwa:

“Kami menjadi anggota kelompok nelayan karena dapat membantu memperlancar pekerjaan kami, seperti dalam pertukaran informasi”.

Keberadaan kelompok nelayan memang dianggap sangat membantu kegiatan para nelayan. Hal ini dikarenakan setiap nelayan yang ingin memperoleh peralatan penangkapan ikan serta barang lainnya dari KUD oleh Pemerintah setempat diharuskan membentuk kelompok nelayan, guna memudahkan koordinasi dan pelayanan pada masyarakat.

Kelompok nelayan yang terbentuk pada umumnya merupakan bentukan masyarakat sendiri yang didorong oleh adanya kebutuhan nelayan itu sendiri. Masyarakat yang berinisiatif dalam membentuk kelompok-kelompok nelayan . Pemerintah setempat hanya menyampaikan bahwa untuk mendapat barang dari KUD harus membentuk kelompok nelayan terlebih dahulu.

D u l u m e m a n g d i a k u i d a l a m operasionalisasinya kelompok nelayan ini dibangun oleh masyarakat secara aktif tanpa campur tangan pemerintah. Pihak pemerintah hanya memfasilitasi mereka dengan persyaratan, seperti yang dikemukakan oleh Informan, sebagai berikut:

“nelayan yang ingin mendapatkan pinjaman barang-barang dari KUD, seperti pupuk, obat-obatan hama dan barang lainnya, harus membentuk kelompok nelayan, guna memudahkan dalam p e n g e l o l a a n a d m i n i s t r a s i d a n penyalurannya sehingga apa yang diinginkan para nelayan benar-benar sampai di tangan pengelola sumberdaya laut (nelayan)”.

Namun sekarang banyak persoalan kelompok nelayan yang muncul dalam masyarakat dan bisa mempengaruhi keutuhan kepercayaan yang selama ini dibina walaupun demikian keberadaan kelompok nelayan tetap terbangun. Anggota kelompok nelayan terdorong untuk selalu mempertahankan kelompoknya karena dianggap satu-satunya cara yang paling muda dalam memperoleh barang untuk keperluan kenelayanan, walaupun perlu ada jaminan, dengan cara barang yang ada di koperasi bisa dipinjam dan dilunasi setelah menjual hasil tangkapannya di laut. Hal ini yang dialami oleh para nelayan dalam menyasati kehidupan yang terkadang naik turun.

Senada yang dikemukakan oleh ketua kelompok Nelayan Darma Utama yang beranggotakan 5 orang dalam pertemuannya dengan peneliti, diceritakan bahwa dia sangat bersyukur dengan adanya kelompok nelayan karena telah banyak membantu dalam kegiatan kenelayanan mereka. Sekalipun demikian adanya tetap saja ada masalah, namun masalah yang dihadapi masih dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam pembentukan kelompok nelayan, salah satu anggota berinisiatif untuk mengumpulkan beberapa warga yang memiliki perahu dan saling berdekatan. Selanjutnya dalam pertemuan inilah ditunjuk salah satu anggota yang menjadi ketua. Dalam pemilihan pengurus, terkesan masing-masing mengedepankan nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat nelayan yang tetap menghargai orang yang dituakan. Pada umumnya yang diangkat sebagai ketua kelompok nelayan adalah orang-orang yang dianggap berpengalaman dalam hal kenelayanan, hal ini mencerminkan bahwa masih sangat dihormatinya tokoh-tokoh informal dalam pengambilan keputusan.

Dalam kegiatan rutinnnya, setiap ada masalah selalu dirembukkan secara bersama-sama yang dilakukan dimana saja mereka dapat bertemu, baik sebelum turun ke laut atau ketika mereka sedang mempersiapkan diri untuk turun ke laut untuk mengambil satu keputusan. Namun yang menarik adalah apabila ada anggota yang tidak hadir pada saat pertemuan dan keputusan yang diambil disampaikan begitu saja tapi anggota yang tidak hadir pada pertemuan tersebut tetap melaksanakan hasil keputusan musyawarah tersebut.

2. Institusi Lokal

Institusi dipahami sebagai tata nilai yang mengkostruksikan tindakan orang dan interaksi orang. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa setiap lembaga mempunyai norma dan nilai tertentu yang diberlakukan dan dipertahankan serta dikembangkan di kalangan anggota masyarakat. Ia dipatuhi dan dihormati serta menjadi acuan dalam pola tingkah laku masyarakat, dan bahkan menjadi bagian dari sosio budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Norma dan nilai itu telah menyatu dengan kehidupan warga desa, sehingga sering kali sudah menjadi gerak reflek

dalam kehidupan, jika ada sesuatu tindakan dari masyarakat yang menyimpang dari adat atau kebiasaan yang berlaku, maka mereka yang mengetahui langsung menegur atau mengingatkan dan menasehatinya. Masing-masing anggota masyarakat berkewajiban mengawasi tetap berlakunya norma dalam masyarakat sehingga menjadi pengendali secara umum.

Dari beberapa lembaga lokal yang tetap hidup dalam masyarakat yang memiliki institusi kuat dan dianggap efektif, salah satu diantaranya adalah kelompok *Duduk bersama* yang dapat kita temui dalam masyarakat yang sudah menjadi tradisi dan sampai sekarang tetap dipertahankan keberadaannya mempunyai jangkauan wilayah yang lebih luas hampir meliputi satu kabupaten disetiap kabupaten penelitian.

Duduk bersama merupakan wadah bagi para nelayan dan kelompok nelayan lainnya dalam menyampaikan aspirasinya sehubungan dengan berbagai permasalahan dalam aspek kenelayanan yang dihadapi. Wadah ini diprakarsai oleh pemerintah daerah yang melibatkan berbagai pihak antara lain; tokoh masyarakat, tokoh adat, orang yang dianggap berpengalaman dalam hal kenelayanan dan kelompok nelayan.

Kegiatan *Duduk bersama* sudah menjadi tradisi dikalangan para nelayan dan kelompok nelayan untuk rembuk bersama dalam rangka membicarakan beberapa permasalahan nelayan terutama waktu melaut secara serentak, maupun waktu melaut secara perorangan, batas batas operasional dan masalah masalah lainnya berkenaan dengan kenelayanan. Kegiatan *Duduk bersama* sudah ada sejak dahulu hingga sekarang dan keberadaannya sangat dihormati oleh masyarakat sebagai sarana musyawarah dalam membicarakan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya laut.

Karena melihat kondisi nelayan yang

beraneka ragam dan seringnya muncul permasalahan nelayan, sehingga muncul ide dan mengumpulkan tokoh informal dan nelayan untuk mencari jalan keluarnya dan terciptalah kesepakatan membentuk *Duduk bersama* diprakarsai oleh pemerintah daerah. Fenomena yang menarik disini adalah peran pemerintah sebagai pemrakarsa dan tidak terlalu mengintervensi operasionalisasi kegiatan *Duduk bersama* ini, hanya pada penentuan beberapa hal seperti hari, tanggal pelaksanaan turun ke laut. Dengan penetapan yang diputuskan dalam

Duduk bersama mengenai waktu turun ke laut yang dulunya berjalan sendiri-sendiri. Namun sekarang secara serentak dan bersama mengelolah laut, dan tidak seorangpun yang berani melanggar keputusan itu.

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini dianggap cukup baik dan didukung oleh tokoh masyarakat setempat. Dalam acara pelaksanaan *Duduk bersama* beberapa tanggapan dari para nelayan, tokoh masyarakat, dan peserta lainnya antara lain;

“Setiap pertemuan Duduk bersama semua yang diundang wajib hadir untuk menyatukan pendapat supaya semua informasi dan keputusan dapat diketahui oleh semua warga”

Berikut ini petikan hasil wawancara dengan

seorang Informan mengungkapkan bahwa;

“Saya jarang hadir, karena saya pikir informasi atau putusan kegiatan ini dapat saya peroleh dari teman atau tetangga yang hadir”

Memang keberadaannya dibutuhkan walaupun ada sebagian anggota yang jarang hadir, namun mereka juga mengharapkan dan membutuhkan hasil musyawarah dari *Duduk bersama*. Mengenai keterlibatan anggota yang hadir dalam kegiatan *Duduk bersama* menunjukkan bahwa dalam pertemuan *Duduk*

bersama ada sebagian nelayan yang mengungkapkan beberapa permasalahan dan sebagian lagi ada yang memberikan respon atau jawaban berdasarkan pengalaman mereka masing-masing atas pertanyaan yang diajukan. Dan tidak sedikit dalam pertemuan acara *Duduk bersama* hanya datang tanpa mengeluarkan pendapat baik itu berupa pertanyaan atau pernyataan jawaban atas permasalahan yang ada. Namun mereka hanya mendengarkan segala pembicaraan yang berlangsung.

Hal yang menarik disimak setelah pertemuan *Duduk bersama* adalah hampir setiap anggota kelompok nelayan saling membagi informasi baik yang menyangkut masalah keluarga maupun masalah antara anggota kelompok nelayan dalam pengelolaan sumberdaya laut. Interaksi di luar forum inilah yang banyak mengungkap -kan banyak permasalahan dan informasi penting bagi kegiatan pengelolaan sumber-daya laut menurut pengalaman masing masing di lapangan. Seperti penuturan Informan yang juga salah satu tokoh masyarakat mengatakan bahwa;

“Pertemuan setelah acara buduk bersama terkadang lebih ramai dibanding saat berlangsungnya diskusi dalam acara duduk bersama, hal ini mungkin disebabkan perasaan segan ataupun perasaan malu dari anggot lainnya”.

Kondisi inilah yang menjadi arena saling membagi atau saling mengukur informasi yang secara tidak langsung menimbulkan kerekatan sosial antara sesama anggota masyarakat, dan keterbukaan antara mereka juga mewarnai suasana ini sehingga timbul rasa saling percaya antara mereka.

B. Identifikasi Elemen Modal Sosial dalam upaya Pengentasan Kemiskinan dan Pengembangan Masyarakat Nelayan

Telah disebutkan bahwa modal sosial

mengandung sekurangnyanya tiga elemen pokok

berikut: (1) hubungan saling percaya (*trust*), didukung oleh adanya kejujuran (*honesty*), kewajaran (*fairness*), sikap egaliter

(*egalitarianism*), toleransi (*tolerance*) dan kemurahan hati (*generosity*); (2) pranata (*institutions*) yang meliputi nilai-nilai yang dimiliki bersama (*shared values*), norma-norma dan sanksi-sanksi (*norms and sanctions*) dan aturan-aturan (*rules*); (3) jaringan sosial (*social networks*), yang meliputi adanya partisipasi (*participation*), pertukaran timbal balik (*reciprocity*), solidaritas (*solidarity*), kerjasama (*collaboration/cooperation*) dan keadilan (*equity*).

Keterkaitan antar elemen dalam bangunan modal sosial tersebut dapat dibaca sebagai satu kesatuan: hubungan saling percaya bisa tumbuh apabila orang berlak

kejujuran akan tumbuh pula sikap fair, dan dengan paham egaliter seseorang akan toleran, karena itu ia akan lebih mudah untuk bermurah hati. Hubungan saling percaya juga akan tumbuh apabila jaringan sosial menyediakan ruang bagi warganya untuk berpartisipasi setara, yang dengan itu akan bekerja prinsip resiprositas, dan akan mendorong tumbuhnya solidaritas antar warga, selanjutnya terjadilah kerjasama, yang dengan adanya institusi dan saling percaya akan melahirkan keadilan. Hubungan-hubungan antar orang di dalam jaringan sosial akan berlangsung baik apabila mereka memiliki nilai-nilai yang dianut bersama, norma-norma dan sanksi-sanksi serta aturan-aturan yang disepakati bersama yang menjadi acuan tindak, yang apabila dilaksanakan dengan tegas dan adil akan percaya.

Tabel Identifikasi Elemen TRUST dalam pengelolaan Sumberdaya Laut dalam upaya pengentasan kemiskinan secara mandiri

NO	ELEMEN MODAL SOSIAL	PENGELOLAAN SUMBERDAYA LAUT	
		KASUS PERSISTEN	KASUS RESISTEN
I	Hubungan saling percaya (<i>TRUST</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Ada prasyarat orang yang terpercaya untuk ketua kelompok nelayan. ➢ Sistem pengelolaan harus dapat memberikan jaminan kepercayaan bagi warga komunitas 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Prasyarat sama, tapi tidak berjalan ➢ Sistem pengelolaan tidak dapat memberikan jaminan kepercayaan bagi warga komunitasnya.
	a. Kejujuran (<i>HONESTY</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Syarat mutlak untuk pengurus kelompok nelayan terutama bendahara ➢ Jujur dan transparan dalam menggunakan hasil mengelola hasil kelompok nelayan 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Ketidakjujuran menyebabkan pengelolaan kelompok nelayan terancam bubar.
	b. Kewajaran (<i>FAIRNESS</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Berlaku wajar (fair) dalam menegakkan aturan main, tidak pilih kasih ➢ Menyesuaikan kadar aturan dan sanksi sesuai dengan kesepakatan tingkat kesanggupan warga nelayan 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Sering terjadi ketidakwajaran dalam penegakan aturan main, Misalnya pilih kasih, pura-pura tidak tahu, berat sebelah, dsb
	c. Egaliter	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Tidak membedakan kedudukan seseorang untuk pilih menjadi pengurus kelompok nelayan. 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Tidak membedakan kedudukan seseorang untuk dipilih menjadi ketua kelompok.
	d. Toleransi	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Ketua kelompok mau turun langsung ke lapangan, tidak hanya memerintah 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Ketua kelompok kurang proaktif ke lapangan ➢ Sama seperti kasus persisten
	e. Kemurahan hati (<i>generosity</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Ada pengecualian bagi bagi anggota kelompok nelayan yang sedang sakit untuk tdk melaut ➢ Menyikapi aktivitas pengelolaan WL sebagai ajang pengabdian kepada masyarakat, bagian dari amal/ibadah ➢ Sukarela memberi tenaga, waktu dan materi untuk keberhasilan pengelolaan WL ➢ Merasa senang, bangga dan dihargai atas pengabdian pengurus kepentingan masyarakat desa 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Menyikapi aktivitas pengelolaan sumberdaya laut sebagai aktualisasi diri, mencari keuntungan



Tabel Identifikasi Elemen Pranata (INSTITUTIONS) dalam pengelolaan Sumberdaya Laut dalam upaya pengentasan kemiskinan secara mandiri

NO	ELEMEN MODAL SOSIAL	PENGELOLAAN SUMBERDAYA LAUT	
		KASUS PERSISTEN	KASUS RESISTEN
II	<p>PRANATA (Institutions)</p> <p>a. Nilai-nilai yang dianut bersama (shared values)</p> <p>b. Norma dan sanksi</p> <p>c. Aturan-aturan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memiliki sistem pengelolaan yg baik dari hasil kreasi & kesepakatan bersama warga komunitas nelayan. ➤ Menilai penting sikap kebersamaan dalam menanggulangi masalah yang dihadapi warga komunitas nelayan ➤ Menilai penting kesalahan sosial ➤ Menilai tinggi kerjasama kolektif ➤ Mementingkan nilai keagamaan, pendidikan, pemeliharaan anak yatim dan kaum miskin ➤ Terlarang memakan harta anak yatim ➤ Kaum miskin dan anak yatim menjadi tanggungan masyarakat ➤ Tidak boleh mementingkan diri sendiri ➤ Menerapkan sanksi sosial jika terjadi pelanggaran sumberdaya laut adalah milik bersama ➤ Ada sanksi yang tegas bagi pelanggar aturan ➤ Aturan-aturan dibuat berdasarkan kesepakatan bersama ➤ Aturan dibuat sesuai dengan tingkat kemampuan warga komunitas dalam menegakkannya. ➤ Aturan berlaku bagi semua orang tanpa pengecualian ➤ Aturan disesuaikan dari waktu ke waktu, ditetapkan melalui mekanisme musyawarah sesama anggota kelompok. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memiliki sistem pengelolaan, tapi biasanya merupakan tiruan dari komunitas lain, bukan dilandasi kebutuhan & kesepakatan bersama. ➤ Sama dengan kasus persisten, tapi tidak tegas dalam menerapkan sanksi atas pelanggaran ➤ Sumberdaya laut tidak dihayati sebagai milik komunitas dan milik bersama. ➤ Sebagian memiliki aturan yang rinci dalam konteks pengelolaan sumberdaya laut. ➤ Aturan dan sanksi tidak dapat ditegakkan dgn tegas.

Tabel Identifikasi Elemen JARINGAN SOSIAL (Social Network) dalam pengelolaan Sumberdaya Laut dalam upaya pengentasan kemiskinan secara mandiri

NO	ELEMEN MODAL SOSIAL	PENGELOLAAN SUMBERDAYA LAUT	
		KASUS PERSISTEN	KASUS RESISTEN
III	Jaringan Sosial (Social Network)	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Ada satuan sosial yang tegas sebagai pemilih peralihan alat tangkap dan alat kenelayanan lainnya. ➢ Ada organisasi yang berwenang dan berfungsi efektif menjalankan kelompok pengelolaan Sumberdaya laut. 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Ada satuan sosial yang tegas sebagai pemilih dan pengelola Sumberdaya Laut ➢ Ada organisasi yang berwenang mengelola tapi pada umumnya tidak efektif berfungsi
	a. Partisipasi	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Semua warga komunitas nelayan ikut berpartisipasi secara proporsional dalam kelompok pengelolaan sumberdaya laut ➢ Setiap warga bertak untuk dilibatkan dalam organisasi kepanitiaan, berhak memilih dan dipilih. ➢ Setiap warga bertak mengemukakan usulan, dan berhak turut serta dalam proses pengambilan keputusan menyangkut pengelolaan kelompok pengelola sumberdaya laut. ➢ Pengambilan keputusan mengenai kelompok pengelola sumberdaya laut dilakukan dengan mekanisme <i>duduk bersama</i>, sesuai dengan masalah yang akan diputuskan 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Dalam tataran idealnya semua warga ikut berpartisipasi dalam pengelolaan namun dalam kenyataannya tidak berjalan secara efektif ➢ Partisipasi dalam pemanfaatan hasil WL tidak berjalan baik, karena sasaran pemanfaatan biasanya tidak memenuhi kebutuhan semua warga komunitas
	b. Resiprositas	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Ada pergiliran untuk menjadi pengelola kelompok nelayan, baik dalam unsur kepanitiaan maupun dalam regu jaga. ➢ Orang yang melaporkan pelanggaran dalam pemanfaatan sumberdaya laut mendapat insentif dan perlindungan saksi. ➢ Ada nilai-nilai yang ditanamkan bahwa menjaga dan melestarikan laut akan mendapatkan imbalan immaterial baik di dunia maupun di akhirat. 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Ada pergiliran untuk mengelola kelompok nelayan ➢ Tidak ada insentif dan perlindungan saksi bagi orang yang melaporkan tindak pelanggaran pemanfaatan sumberdaya laut. ➢ Ada kecenderungan oknum memanfaatkan kepercayaan warga komunitas nelayan untuk mengambil manfaat untuk kepentingan sendiri.
	c. Solidaritas	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Semua warga mendukung keputusan kolektif meskipun ada bagian-bagian yang tidak disetujui. ➢ Mau berkorban untuk kepentingan masyarakat ➢ Berempati atas penderitaan yang dialami sebagian warga komunitas nelayan 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Dukungan atas keputusan kolektif menyangkut pemanfaatan pengelolaan sumberdaya laut tidak bersifat bulat. ➢ Mengutamakan kepentingan sendiri masih sangat kuat daripada kepentingan bersama
	d. Kerjasama	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Partisipasi aktif semua warga dalam proses pengelolaan sumberdaya laut sesuai dengan keahlian masing. ➢ Warga komunitas nelayan kompak dalam melakukan kegiatan gotong royong. 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Warga komunitas nelayan tidak kompak dalam melakukan kegiatan gotong royong.
	e. Keadilan	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Kelompok pengelola sumberdaya laut berlaku adil dalam menegakkan aturan, baik dalam proses pemeliharaan maupun pemanfaatan laut ➢ Ada pertanggungjawaban publik 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Kelompok pengelola sumberdaya laut tidak memberikan rasa keadilan kepada warga masyarakat.

KESIMPULAN

Modal sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan, sangat membantu warga pendatang di dalam mengatasi pemenuhan kebutuhan. Modal sosial dalam kerangka kelembagaan lokal tersebut tidak hanya sebatas dalam usaha saja, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan keseharian seperti mendapatkan modal yang tidak berkaitan dengan usaha (untuk membayar uang sekolah atau lainnya). Hubungan patronase sebagai model manajemen usaha tersebut nyata dirasakan warga pendatang, sehingga meski mereka merasa tidak diperhatikan pada saat bantuan pemerintah diturunkan, mereka tetap tenang dan menjaga keharmonisan desa. Kasus tersebut memberikan mereka pelajaran sehingga hubungan antara *punggawa* dan *sawi* semakin erat dimana keduanya saling membutuhkan. Kelembagaan lokal patronase yang diterapkan tersebut kemudian mendorong terciptanya modal sosial seperti rasa tanggung jawab atas kerja sama yang dibangun antar keduanya, saling menghormati, kejujuran, yang kesemuanya diperuntukkan agar jaringan usaha tetap terjaga.

Langkah yang perlu dilakukan guna peningkatan modal sosial dalam kerangka kelembagaan lokal khususnya usaha warga untuk desa lokasi penelitian, adalah dengan memberikan bantuan atau program pengembangan kreatifitas yang merata bagi seluruh warga. Dengan demikian diperlukan pendataan awal tentang warga pendatang, non-pendatang, keturunan bangsawan, dan non-keturunan bangsawan, yang selanjutnya diundang seluruhnya dengan memberikan tanggung jawab kepada yang lebih berhak – dalam pandangan usaha.

Kelembagaan lokal yang berbasis keluarga sebagaimana yang diterapkan pada desa-desa nelayan tersebut, telah menciptakan

modal sosial yang sangat baik di dalam menanggulangi masalah kemiskinan akibat pengangguran. Modal sosial yang dimaksud tidak lain timbul dari mobilisasi anggota yang merata, saling menghormati, kejujuran serta rasa tanggung-jawab yang tinggi terhadap usaha dan keluarga. Dengan itu, diasumsikan bahwa seorang anggota keluarga tidak akan dilihat terlantar tanpa memiliki pekerjaan, terlebih telah menikah, sebab kelembagaan lokal melegalkan ikut-serta keluarga dalam usaha (legal dalam arti tidak dapat disamakan dengan model patronase dimana keluarga sebenarnya tidak dapat diikuti-sertakan – keluarga dalam hubungan patronase lebih diartikan agar lebih akrab dan bukan karena hubungan darah).

DAFTAR PUSTAKA

- Agussalim, 2009., *Mereduksi Kemiskinan Sebuah Proposal Baru untuk Indonesia.*, PSKMP Unhas, Nalaciptalitera; Makassar
- Baker, Wayne 2000., *Achieving Succes Through Social Capita. Tapping the Hiden Resources in Your Personal and Business Networks.* Jossey- Bass. A Wiley Company. San Francisco
- Bappenas RI., 2005. *Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2005-2009.* Bappenas-Jakarta.
- Cox, E. 1998., *Measuring Social Capital as part of Progress and well-being.* Paper presented to CSIRO.
- Dahuri, Rohmin 2002., *Pengelolaan Kelautan dan Perikanan Nasional.* PT. Bumi Aksara Jakarta.
- Falk, Ian & Kilpatrick, Sue 1999., *What is Social Capital? A study of Interaction in a Rural Community.* Centre for Research and Learning in Rural Australia. Faculty of Education University of Tasmania.

- Kadir, Misriaty 2004., *Peningkatan Kemampuan dan Penguatan Kelembagaan dalam Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Tesis, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Kaplan, David & Albert A. Manners 1999., *Teori Budaya*. Terjemahan; The Theory of Culture. Yogyakarta; Pustaka Press.
- Keesing, Roger M. 1981., *Antropologi Budaya Suatu Perspektif Kontemporer*. (terjemahan: Samuel Gunawan) . Surabaya; Erlangga.
- Koentjaraningrat, 1981., *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta; Gramedia.
- Kilpatrick, Sue; Rowena Bell & Ian Falk 1998., *Groups of Groups: The Role of group learning in building social capital*. Centre for Research and Learning in Regional Australia. Faculty of Education University of Tasmania. Launceston.
- Fountain, E. Jane 1997., *Social Capital: A Key Enabler of Innovation in Science and Technology*. Published in L. M. Brannscornb and J. Keller, eds. Investing in Innovation: Toward A Consensus Strategy for Federal Technology Policy. Cambridge: The MIT Press.
- Fukuyama, Francis 1999., *Social Capital and Civil Society*. Prepared for delivery at the IMF Conference on Second Generation Reform. The Institute of Public Policy George Mason University.
- M. K. Smith., 2001 'Social Capital', the encyclopedia of Informal education. Infed.
- Naping, Hamka 2002., *Fungsi Kelembagaan Lokal Dalam Menunjang Pembangunan di Daerah*. JICA –PSKMP Unhas, Makassar.
- _____. 2003 *Studi Perancangan Model Pembangunan Masyarakat Nelayan di Sulawesi Selatan*. Penelitian Dasar, DIRJEN DIKTI.
- _____. 2007 *Nilai-Nilai Tradisional Kebahariaan yang Menunjang Konservasi Lingkungan Laut di Perairan Selat Makassar Sulawesi ..*
- _____. 2009 *Model Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Nelayan Di Propinsi Sulawesi Barat*. Dilaksanakan atas kerjasama dengan Pemda Propinsi Sulawesi Barat.
- _____. 2009 *Kelembagaan Lokal Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Lngkungan Laut Masyarakat Nelayan di Galesong Kab. Takalar*. Kerjasama Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Wilayah Sulsel-Bar dan Ternggara.
- _____. 2011 *Perempuan Pesisir dan Rumput Laut (Studi Tentang Perubahan Peranan Perempuan Dalam Ekonomi Rumah Tangga Pada Masyarakat Biangkeke Kabupaten Bantaeng)*. Penelitian Mandiri.
- Nugroho, Bambang, 2009. *Sinergi Antara Pemerintah Desa dan Badan Keswadayaan Masyarakat dalam Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan, di Kabupaten Bantul*, Program Pascasarjana Unhas, tidak dipublikasikan.
- Nugroho, Iwan dan Dahuri Rokhmin, 2004. *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. LP3ES:Jakarta.
- _____. *The prosperous The American Prospect*. Pp 35-42. *Aspek Kelembagaan*
- Saenong, Zainuddin 2004., *Studi Kasus di Gili Trawangan*. Majalah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Haluoleo, Kendari, ISSN 0853-2257.
- Salman, Darmawan 2004., *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*. Makalah, disampaikan pada Diklat TMPP-

D. Kerjasama Unhas – Bappenas.

Kemiskinan dan Pembangunan di

Makassar. PSKMP. *Pembangunan* . Yayasan
 Partisipatif
 Salman, Darmawan, 2005. Modul Konsentrasi Wiresapta, Karyadi 2004.

Manajemen Perencanaan. Program *Membangun Masyarakat* Hasil Penelitian. Universitas Haluoleo,
 Pascasarjana Unhas. Kendari.
Memberdayakan Rakyat

Suharto, Edy. 2005. Rafika Aditama: *Building Intitutions for Markets* (WDR)
 World Development Report
 Bandung, 2002,. Kata

Pengantar James D. Wolfensohn.